E-ISSN: 3025-0994
Halaman 6041-6050
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026

Strategi Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dalam Mengatasi Keterbatasan Informasi Publik Melalui Pemanfaatan Media Sosial

Else Dewi Angraini[1], Heru Purnawan[2], Evsa Wulan Suri[3]

[1,2,3] Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu
e-mail: elsedewianggraini@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya keterbukaan informasi publik dalam mendukung pemerintahan yang transparan dan responsif melalui pemanfaatan media sosial. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan strategi Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dalam mengatasi keterbatasan informasi publik melalui media sosial berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Bengkulu. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap lima informan yang terdiri dari kepala bidang, admin media sosial, staf Dinas Sosial, dan masyarakat. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi publik dilaksanakan melalui pemanfaatan media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan website resmi untuk menyebarluaskan informasi mengenai bantuan sosial, pelayanan sosial, dan kegiatan dinas. Strategi diwujudkan melalui koordinasi antarbidang, penggunaan bahasa sederhana yang mudah dipahami, serta kerja sama dengan pihak kecamatan dan desa. Pemanfaatan media sosial dinilai cukup efektif dalam meningkatkan akses informasi masyarakat, meskipun masih terdapat hambatan berupa keterbatasan jaringan internet, rendahnya literasi digital, keterbatasan sumber daya manusia, dan penyebaran hoaks. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan media sosial mampu meningkatkan efektivitas penyebarluasan informasi publik serta mendukung transparansi dan pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Strategi Komunikasi Publik, Informasi Publik, Media Sosial, Dinas Sosial

Abstract

This study was motivated by the importance of public information disclosure in supporting transparent and responsive governance through the utilization of social media. The research aims to describe the strategy of the Bengkulu Provincial Social Service in overcoming public information limitations through social media based on Governor Regulation Number 31 of 2021 concerning the Dissemination of Information on the Administration of the Bengkulu Provincial Government. This study employed a descriptive qualitative method. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving five informants consisting of division heads, social media administrators, Social Service staff, and community members. Data analysis used the Miles and Huberman model through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, with validity ensured through source, technique, and time triangulation. The results showed that the public communication strategy was implemented through the use of social media platforms including Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, and the official website to disseminate information on social assistance, social services, and agency activities. The strategy was executed through interdepartmental coordination, the use of simple and comprehensible language, and collaboration with sub-districts and villages. The utilization of social media was considered quite effective in improving public access to information, although obstacles remained such as limited internet connectivity, low digital literacy, limited human resources, and the spread of misinformation. The study concludes that the use of social media can improve the effectiveness of public information dissemination and support transparency and public service delivery within the local government.

Keywords: Public Communication Strategy, Public Information, Social Media, Social Service

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah tidak lagi hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga dituntut untuk menyediakan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses melalui berbagai platform digital. Keterbukaan informasi publik dalam perspektif tata kelola pemerintahan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan prinsip good governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi publik, Pemerintah Provinsi Bengkulu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Bengkulu sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dalam menyampaikan informasi

kepada masyarakat. Peraturan ini secara normatif memuat ketentuan yang mengarah pada strategi penyebarluasan informasi publik, mulai dari perencanaan, tujuan, penentuan isi informasi, penyediaan data, pengklasifikasian, hingga pemilihan media komunikasi.

Dinas Sosial Provinsi Bengkulu memiliki karakteristik khusus karena mengelola informasi yang berkaitan langsung dengan masyarakat, terutama penerima bantuan sosial dan kelompok rentan. Tidak seluruh informasi dapat disampaikan secara terbuka kepada publik karena adanya kebutuhan untuk melindungi data pribadi serta informasi yang bersifat sensitif. Meskipun berbagai informasi telah dipublikasikan melalui media sosial dan website resmi, masih terdapat beberapa permasalahan seperti belum meratanya jangkauan informasi, rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, serta kurangnya kejelasan dalam penyampaian informasi.

Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada pemanfaatan media sosial dalam komunikasi pemerintah secara umum, tanpa mengkaji secara spesifik strategi Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dalam mengatasi keterbatasan informasi publik melalui media sosial berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara mendalam bagaimana strategi tersebut dirumuskan, dilaksanakan, dan dievaluasi dalam mendukung keterbukaan informasi publik yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Strategi dan Manajemen Strategi

Strategi merupakan sarana untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien (David, 2021). Dalam konteks sektor publik, Bryson (2021) menjelaskan bahwa strategi merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Manajemen strategi menurut David et al. (2023) terdiri dari tiga tahapan utama: perumusan strategi (strategy formulation), implementasi strategi (strategy implementation), dan evaluasi strategi (strategy evaluation). Dalam penelitian ini, strategi yang diterapkan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu termasuk dalam kategori strategi fungsional, yaitu strategi komunikasi publik melalui pemanfaatan media sosial.

Strategi Komunikasi Publik dan Media Sosial dalam Pemerintahan

Strategi komunikasi publik merupakan serangkaian perencanaan terintegrasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Littlejohn dan Foss (2021) menjelaskan bahwa komunikasi merupakan proses yang melibatkan pengirim pesan, isi pesan, media, khalayak, serta efek yang dihasilkan. Mergel (2022) menegaskan bahwa strategi dalam sektor publik harus terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi digital karena media sosial memungkinkan penyebaran informasi secara cepat, luas, dan interaktif. Kietzmann et al. (2021)

menambahkan bahwa media sosial mendukung komunikasi dua arah yang meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Fokus	Kesenjangan	Hasil
1	Mergel (2022)	Komunikasi digital pemerintah	Belum spesifik pemerintah daerah	Meningkatkan efektivitas dan transparansi
2	Kietzmann et al. (2021)	Keterlibatan via media sosial	Tidak fokus instansi pemerintah	Meningkatkan partisipasi masyarakat
3	Bonsón et al. (2022)	Media sosial sektor publik	Tidak bahas strategi keterbatasan informasi	Meningkatkan transparansi
4	OECD (2023)	Komunikasi pemerintah digital	Masih umum, belum spesifik OPD	Meningkatkan pelayanan publik
5	Bryson (2021)	Strategi sektor publik	Belum fokus pada komunikasi digital OPD	Meningkatkan nilai publik dan efektivitas organisasi

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 1, penelitian terdahulu secara umum membahas komunikasi digital dan media sosial dari perspektif yang masih bersifat umum. Penelitian ini hadir sebagai kontribusi baru dengan mengkaji secara spesifik strategi komunikasi publik berbasis media sosial pada Dinas Sosial Provinsi Bengkulu sebagai representasi OPD yang memiliki karakteristik informasi sensitif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai strategi Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dalam mengatasi keterbatasan informasi publik melalui pemanfaatan media sosial (Moleong, 2021). Lokasi penelitian adalah Dinas Sosial Provinsi Bengkulu yang dipilih secara purposive karena merupakan instansi yang secara aktif melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Bengkulu. Penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Mei 2026.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: (1) wawancara mendalam kepada informan yang dipilih secara purposive sampling; (2) observasi partisipatif terhadap aktivitas pengelolaan media sosial; dan (3) dokumentasi berupa arsip, unggahan media sosial, dan dokumen resmi. Informan berjumlah lima orang yang terdiri dari informan kunci (kepala bidang), informan utama (admin media sosial dan staf), serta informan pendukung (dua orang masyarakat penerima informasi publik).

Tabel 2. Karakteristik Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan	Peran
1	Prili Yerisha Ogta, S.Tr.Sos	Pekerja Sosial Ahli Pertama / Kepala Bidang	Informan Kunci
2	Sheren Hfianisa, S.Tr.Sos	Admin Humas/Pengelola Media Sosial Dinas Sosial	Informan Utama
3	Wiwik Suzana, S.Sos	Pekerja Sosial Ahli / Staf Dinas Sosial Provinsi Bengkulu	Informan Utama
4	Susanti	Masyarakat Penerima Informasi Publik	Informan Pendukung
5	Eni Fitriani	Masyarakat Penerima Informasi Publik	Informan Pendukung

Sumber: Hasil Penelitian, 2026

Analisis data mengacu pada model analisis interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber (membandingkan data dari aparatur dinas, aparat wilayah, dan masyarakat), triangulasi teknik (wawancara, observasi, dan dokumentasi), serta triangulasi waktu (pengumpulan data pada waktu berbeda untuk memastikan konsistensi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dinas Sosial Provinsi Bengkulu merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Dinas ini berperan dalam penyelenggaraan pelayanan sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, serta pemberdayaan

masyarakat. Visinya adalah terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan tugasnya, dinas juga memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi publik kepada masyarakat sesuai Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021.

Dinas Sosial Provinsi Bengkulu telah memanfaatkan media sosial—meliputi Facebook, Instagram, TikTok, YouTube—serta website resmi sebagai sarana komunikasi publik seiring perkembangan teknologi informasi. Pemanfaatan media digital ini dinilai lebih efektif karena mampu menjangkau masyarakat lebih cepat, luas, dan interaktif dibandingkan media konvensional, sekaligus menjadi upaya mengatasi keterbatasan informasi publik agar informasi mengenai bantuan sosial, pelayanan sosial, dan kegiatan instansi dapat diakses kapan saja.

Perumusan Strategi Penyebarluasan Informasi Publik

Perumusan strategi komunikasi publik dilakukan melalui proses perencanaan bersama antarbidang dengan menyesuaikan program kerja, kebutuhan masyarakat, dan kebijakan pemerintah daerah. Kepala Bidang Prili Yerisha Ogta, S.Tr.Sos menyatakan: "Strategi komunikasi publik disusun melalui perencanaan bersama antarbidang agar penyebaran informasi dapat berjalan efektif. Selain itu, penyebarluasan informasi dilakukan melalui berbagai media komunikasi seperti media sosial dan website resmi serta kerja sama dengan pihak kecamatan dan desa." (Wawancara, 11 Mei 2026).

Hal ini dipertegas oleh Admin Media Sosial Sheren Hfianisa, S.Tr.Sos: "Perumusan strategi dilakukan melalui koordinasi dengan tim humas berdasarkan kebutuhan informasi masyarakat dan program yang sedang berjalan. Penyebaran informasi juga dilakukan melalui beberapa media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan website resmi agar informasi dapat menjangkau masyarakat lebih luas." (Wawancara, 11 Mei 2026). Temuan ini sejalan dengan teori manajemen strategi David et al. (2023) yang menyatakan bahwa perumusan strategi merupakan proses penyusunan tujuan dan langkah organisasi untuk mencapai sasaran secara efektif.

Implementasi Strategi Penyebarluasan Informasi Publik

Implementasi strategi dilakukan melalui publikasi informasi menggunakan bahasa sederhana, singkat, dan jelas, serta didukung gambar dan video agar mudah dipahami masyarakat. Sebelum dipublikasikan, informasi melalui proses koordinasi dan verifikasi untuk memastikan kesesuaian dengan fakta di lapangan dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Pengklasifikasian informasi dilakukan sesuai aturan, terutama terkait perlindungan data pribadi penerima bantuan sosial.

Dari perspektif masyarakat, Susanti (Penerima Informasi, 15 Mei 2026) menyatakan bahwa "Informasi yang disampaikan oleh Dinas Sosial melalui media sosial dan kegiatan sosialisasi dinilai cukup membantu dalam memperoleh informasi mengenai bantuan sosial, pelayanan sosial, serta kegiatan dinas. Informasi yang dipublikasikan melalui Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan website resmi lebih mudah diakses dan dapat diketahui dengan cepat." Temuan ini selaras dengan teori implementasi strategi David et al. (2023)

serta model komunikasi Littlejohn dan Foss (2021) di mana Dinas Sosial bertindak sebagai komunikator, media sosial sebagai saluran, dan peningkatan pemahaman masyarakat sebagai efek yang diharapkan.

Hambatan dan Upaya Mengatasi Keterbatasan Informasi Publik

Pelaksanaan penyebarluasan informasi publik masih menghadapi sejumlah hambatan. Kepala Bidang Prili menyebutkan: "Hambatan utama yang dihadapi yaitu masih adanya masyarakat yang belum memiliki akses internet, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap informasi digital, serta adanya informasi tertentu yang tidak dapat dipublikasikan karena bersifat rahasia." (Wawancara, 11 Mei 2026). Admin media sosial Sheren menambahkan bahwa penyebaran hoaks di media sosial dan adanya akun palsu yang mengatasnamakan Dinas Sosial turut menjadi tantangan serius dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Dinas Sosial melakukan beberapa upaya: memanfaatkan berbagai platform media sosial secara serentak, melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta melaksanakan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan strategi kolaboratif—sejalan dengan pendapat Bryson (2021) bahwa keberhasilan strategi organisasi dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya dan kemampuan berkolaborasi dengan berbagai pihak.

Transparansi Informasi Publik dalam Pemanfaatan Media Sosial

Transparansi informasi publik diwujudkan melalui penyampaian informasi secara terbuka mengenai program, kegiatan, dan pelayanan sosial, namun tetap memperhatikan batasan informasi yang bersifat rahasia. Proses koordinasi dan verifikasi dilakukan sebelum informasi dipublikasikan untuk memastikan akurasi dan keamanannya. Masyarakat menilai adanya peningkatan keterbukaan informasi sejak Dinas Sosial aktif memanfaatkan media sosial.

Temuan ini sesuai dengan teori transparansi Mardiasmo (2021) bahwa transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik, sejalan pula dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan badan publik memberikan informasi benar dan terbuka, namun tetap memperhatikan informasi yang bersifat rahasia.

Efektivitas Pemanfaatan Media Sosial

Pemanfaatan media sosial dinilai cukup efektif dalam membantu penyebarluasan informasi publik. Penggunaan Facebook ditargetkan untuk masyarakat umum dan usia dewasa, sementara Instagram dan TikTok menjangkau kalangan muda, menunjukkan strategi penggunaan media sosial yang terencana sesuai segmentasi pengguna. Masyarakat menyatakan informasi dapat diakses kapan saja tanpa harus datang langsung ke kantor dinas.

Namun efektivitas masih terkendala keterbatasan akses internet dan literasi digital. Untuk mengatasinya, dinas melakukan penyampaian informasi secara langsung melalui

kerja sama dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa. Temuan ini sejalan dengan teori efektivitas komunikasi Effendy (2019) bahwa komunikasi dikatakan efektif apabila pesan dapat dipahami dan memberikan pengaruh kepada penerima pesan, serta teori media baru McQuail (2020) yang menegaskan karakteristik media digital yang cepat, interaktif, dan mampu menjangkau masyarakat luas.

Tabel 3. Ringkasan Temuan Berdasarkan Aspek Strategi

Aspek Strategi	Temuan Utama	Hambatan
Perumusan Strategi	Koordinasi antarbidang, menyesuaikan kebutuhan masyarakat & program kerja, memanfaatkan Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan website resmi	Belum memiliki rencana komunikasi publik tertulis yang komprehensif
Implementasi Strategi	Informasi dengan bahasa sederhana, visual menarik, proses verifikasi & koordinasi sebelum tayang, kerja sama kecamatan/desa	Kapasitas SDM pengelola media sosial terbatas; konten masih terlalu singkat
Transparansi Informasi	Terbuka namun selektif: informasi pelayanan dipublikasikan, data pribadi penerima bantuan dilindungi sesuai regulasi	Penyebaran hoaks dan akun palsu mengatasnamakan Dinas Sosial
Efektivitas Media Sosial	Dinilai cukup efektif: meningkatkan jangkauan, memudahkan akses 24 jam, mendorong komunikasi dua arah lewat komentar dan pesan langsung	Keterbatasan akses internet & literasi digital masyarakat di beberapa wilayah

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dinas Sosial Provinsi Bengkulu telah melaksanakan strategi penyebarluasan informasi publik melalui pemanfaatan media sosial dan website resmi sebagai sarana komunikasi publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Strategi diwujudkan melalui koordinasi antarbidang dalam perumusan konten, publikasi rutin menggunakan bahasa sederhana yang didukung gambar dan video,

kerja sama dengan pemerintah kecamatan dan desa, serta sosialisasi langsung kepada masyarakat.

Pemanfaatan media sosial terbukti cukup efektif dalam memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan keterbukaan informasi publik sesuai amanat Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 31 Tahun 2021. Meskipun demikian, hambatan berupa keterbatasan akses internet, rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, dan penyebaran hoaks perlu mendapat perhatian serius. Penelitian ini merekomendasikan: (1) peningkatan kapasitas SDM pengelola media sosial; (2) program literasi digital bagi masyarakat, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses; (3) penguatan verifikasi dan penyaringan konten; serta (4) pengembangan kerja sama kolaboratif yang lebih terstruktur antara dinas dan aparat wilayah agar informasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata dan tepat sasaran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Heru Purnawan, S.Sos., M.Si dan Evsa Wulan Suri, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penelitian. Terima kasih kepada Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, khususnya Ibu Prili, Ibu Sheren, dan Ibu Wiwik, serta seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat berharga untuk penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Bonsón, E., Royo, S., & Ratkai, M. (2022). Citizens' Engagement On Local Governments' Facebook Sites. Government Information Quarterly.

Bryson, J. M. (2021). Strategic Planning For Public And Nonprofit Organizations: A Guide To Strengthening And Sustaining Organizational Achievement. Jossey-Bass.

Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2021). Public Value Governance: Moving Beyond Traditional Public Administration And The New Public Management. Georgetown University Press.

Bryson, J. M., & George, B. (2024). Strategic Planning For Public And Nonprofit Organizations: A Guide To Strengthening And Sustaining Organizational Achievement (6th Ed.). Wiley.

David, F. R. (2021). Strategic Management: Concepts And Cases. Pearson.

David, F. R., David, F. R., & David, M. E. (2023). Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts And Cases (18th Ed.). Pearson.

Effendy, O. U. (2019). Ilmu Komunikasi: Teori Dan Praktek. PT Remaja Rosdakarya.

Homburg, C., & Moody, M. (2022). Transparency In Digital Communication: Reducing Information Asymmetry In Public Services. Journal Of Public Administration Research And Theory.

Kietzmann, J. H., Hermkens, K., Mccarthy, I. P., & Silvestre, B. S. (2021). Social Media? Get Serious! Understanding The Functional Building Blocks Of Social Media. Business Horizons.

Linders, D., Liao, C. Z., & Wang, C. M. (2020). Proactive E-Governance: Flipping The Service Delivery Model From Pull To Push In Government. Government Information Quarterly, 37(2), 101–110.

Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2021). Theories Of Human Communication (12th Ed.). Waveland Press.

Mardiasmo. (2021). Akuntansi Sektor Publik. Andi.

Mcquail, D. (2020). Teori Komunikasi Massa Mcquail. Salemba Humanika.

Mergel, I. (2022). Digital Communication Strategy In Government. Public Administration Review.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis Data Kualitatif. Universitas Indonesia Press.

Moleong, L. J. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.

Moore, M. H. (2021). Creating Public Value: The Core Idea Of Strategic Management In Government. International Journal Of Professional Business Review, 6(1), 219.

OECD. (2023). Digital Government Review: Enhancing Public Sector Performance. OECD Publishing.

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Bengkulu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.